**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA RUTAN KELAS
IIB BENGKULU**

Koko Rendy Tarnando^{a1}, Hendri Padmi^{b2}, Fahmi Arisandi^{c3}, Riri Tri Mayasari^{d4}

^{a1} Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Remisi, Rumah Tahanan
Negara, Narapidana

A B S T R A K

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana narkotika di Rutan kelas IIB Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dalam penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, atau sudah

menjalani masa hukuman paling lama 1 tahun. Dan efektivitas pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Bengkulu sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari jumlah narapidana yang memperoleh remisi khususnya narapidana narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik. Dan pemberian remisi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana seperti. Untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti, memaksimalkan pembinaan agar terstruktur dan berkesinambungan di Rumah Tahanan Negara.

ARTICLE INFO

Keyword:
Remission, State Detention Center, and Offenders.

ABSTRACT

State Detention Center is a place where suspects or defendants are detained during the investigation, prosecution, and trial process in Indonesia. This research aims to find out the juridical review of the implementation of remission grant to narcotics offenders based on legislation and to assess the effectiveness of remission grant implementation for narcotics offenders at Class IIB Detention Center, Bengkulu. This study utilizes normative research method, revealing that the implementation of remission grant for narcotics offenders is in accordance with the prevailing procedures stipulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 7 of 2022 concerning to the Requirements and Procedures for Remission, Assimilation, Family Visit Leave, Parole, Pre-release Leave, and Conditional Release. Remission for narcotics offenders must fulfill the requirement of good conduct and have served a sentence for more than 6 (six) months, or have served a maximum sentence of 1 (one) year. The effectiveness of remission grant at Class IIB Detention Center, Bengkulu, has been observed to be compliant with the applicable legislation. This can be evidenced by the number of narcotics offenders granted remission. Therefore, it can be concluded that the rights of offenders to obtain remission in accordance with the prevailing legislation have been implemented effectively. However, there are still factors hindering the implementation of remission grant at Class IIB Detention Center, Bengkulu, resulting in legal consequences for offenders. Various

efforts have been made to minimize these hindering factors, such as maximizing structured and continuous rehabilitation efforts in the State Detention Center.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Perundang-undangan tersebut telah dijelaskan bahwa pemberian remisi dikatakan sebagai syarat mutlak agar narapidana bersedia di bina untuk mengubah perilakunya sesuai dengan misi dari sistem pemasyarakatan. Remisi tersebut berhak diperoleh bila mana narapidana terkait dapat bertingkah laku yang tidak melawan hukum berdasarkan pengamatan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Proses pembinaan dapat berjalan apabila ada interaksi positif dari ketiga elemen utama dalam sistem pemasyarakatan yaitu Petugas, Narapidana dan Masyarakat.¹

Tujuan adanya remisi yaitu agar membuat narapidana yang sedang menjalankan hukuman mau menjalani masa-masa pembinaan dengan baik dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Dari perubahan perilaku narapidana tersebut berarti sistem pemasyarakatan telah berjalan dengan baik.²

Rumah Tahanan Negara atau yang kita kenal dengan sebutan Rutan merupakan lembaga terdahulu yang diketahui selaku Rumah Penjara bagi narapidana, yang menurut pandangan dari Sahardjo, rutan dikatakan bukan hanya tempat yang berfungsi untuk pembinaan pada orang yang diduga melakukan tindak pidana agar mereka setelah menjalankan hukuman pemidanaannya diharapkan memiliki keahlian atau *softskill* agar dapat kembali menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sebelumnya dan taat kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia.³

Dengan demikian, proses ini memungkinkan terpidana penjara seumur hidup untuk mengurangi masa hukumannya melalui perubahan status pidana penjara dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam peraturan remisi yang berlaku. Pemberian remisi memiliki akibat hukum lainnya, salah satunya

¹ Mosgan Situmorang. “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi”. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure* 16, No. 4 (2016),Hlm.374.

² Pasal 34 B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

³ *Ibid.*Hlm.6

adalah komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara selama 15 tahun, dengan syarat bahwa narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit lima tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.⁴

Selain permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang membahas tentang remisi bagi narapidana divonis penjara seumur hidup atau hukuman mati tersebut, terdapat suatu permasalahan lainnya yang berkaitan dengan remisi yaitu adanya permainan surat kelakuan baik yang diperjualbelikan di dalam Rutan, yang mana akan menguntungkan narapidana yang belum memenuhi syarat remisi dan akan merugikan narapidana yang sudah berkelakuan baik namun tidak diberi surat kelakuan baik oleh Kepala Rutan, karena surat tersebut sudah diberikan kepada narapidana lain yang tidak seharusnya mendapat surat kelakuan baik.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi yaitu **“Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Rutan Kelas IIB Bengkulu”**.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif.⁵ Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.. Pendekatan normatif yaitu akan berkaitan mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu.

Adapun data yang dipakai penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dan responden yang berkaitan dengan peran Rumah Tahanan Negara dalam perawatan tahanan ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

⁴*Ibid.*Hlm.82

⁵ Bambang, W. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2012.Hlm.25

Pemasyarakatan.

Data primer biasanya akan tersedia dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah Kembali. Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapat data yang dibutuhkan karena mencarinya dari sumber utama. Karena itu, peneliti bisa menyesuaikan dalam pemilihan narasumber agar bisa mendapatkan data yang dibutuhkan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Medi Ihwandi selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu
2. Bapak LS Hari Chandra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu
3. Narapidana yang belum menerima remisi yaitu Selamat Rianto Bin Sulaiman Sabena
4. Narapidana yang menerima remisi yaitu Riki Boy Sandi Bin Murzal Effendi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersedia dalam bentuk tertulis, seperti buku literatur, surat kabar, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan pendapat dari para ahli yang terkait dengan masalah utama penelitian ini. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- 3) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana/Remisi
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Teknik untuk pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berikut:

B. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Wawancara

Wawancara yaitu teknik dari pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara pengumpul data (pewawancara) dan subjek yang diminati. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Medi Ihwandi selaku Kepala Sub Pelayanan Tahanan Di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Bapak LS Hari Chandra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan Di Rutan Kelas IIB Bengkulu, narapidana yang belum menerima remisi yaitu Selamat Rianto Bin Sulaiman Sabena Narapidana yang menerima remisi yaitu Riki Boy Sandi Bin Murzal Effendi.

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadappl sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁶

Pelaksanaan proses pemberian remisi pada narapidana tindak pidana narkotika pada umumnya sama saja dengan proses pemberian remisi terhadap tindak pidana lainnya yang mana sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang khususnya di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengurangan masa pidana atau remisi ada dua jenis. Pertama, remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus. Kedua, remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.⁷

Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana sesuai ketentuan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang berlaku.⁸

2.2 Efektivitas Pemberian Remisi Pada Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

⁶Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.Hlm.45

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2002. Hlm.8

⁸*Ibid*.Hlm.7

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Semakin banyak tujuan yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.⁹ Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁰

Bapak Medi Ihwandi selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan menyampaikan bahwa narapidana narkotika yang mendapat remisi dilihat dari kelakuan nya sudah baik atau belum ada perubahan. Dalam hal menentukan bahwa apakah narapidana yang ada dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu sudah berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing Rutan selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Selanjutnya bahwa indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat memperoleh remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan Rumah Tahanan Negara yang berlaku.¹¹

Menurut Bapak LS Hari Candra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, ia menyatakan bahwa prosedur pengusulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala

⁹Reni Rizki Noviyanti, *Jurnal Ilmiah Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana*. Mataram: Universitas Mataram. 2019. Hlm.45

¹⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali. Pers, 2003, Hlm. 114.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Medi Ihwanto selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada Tanggal 24 November 2023. Pukul 10.00 Wib

Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.¹²

Bapak LS Hari Candra Simanjuntak juga menyampaikan bahwa narapidana tindak pidana narkoba yang mendapat remisi karena ia selama 1 tahun di dalam Rutan ia berkelakuan baik dan melakukan kegiatan membantu petugas Rutan dan menaati aturan yang berlaku di Rutan.¹³

Adapun beberapa tanggapan dari hasil wawancara dengan Selamat Rianto yang merupakan salah satu narapidana Tindak Pidana Narkoba, ia mengatakan bahwa ia mendapat remisi dikarenakan sering melakukan kegiatan yang membantu petugas Rutan, dan ia dinyatakan berkelakuan baik selama 1 tahun menjalani pemiidanaan di Rutan namun selama menunggu mendapatkan remisi, jika ia melanggar disiplin atau tata tertib Rutan seperti berkelahi sesama narapidana maka hak mendapatkan remisi akan dibatalkan.¹⁴

Selain mewawancarai narapidana yang mendapat remisi, peneliti juga melakukan wawancara dengan narapidana yang sudah memenuhi syarat remisi namun belum mendapatkan remisi yaitu Riki Boy Sandi, ia mengatakan bahwa ia belum mendapatkan remisi padahal sudah memenuhi semua syarat remisi penyebabnya yaitu dikarenakan datanya belum terinput karena sistem

¹² Hasil wawancara dengan Bapak LS Hari Candra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas Iib Bengkulu, Pada Tanggal 24 November 2023.Pukul 09.00 Wib

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak LS Hari Candra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada Tanggal 26 November 2023.Pukul 09.00 Wib

¹⁴ Hasil wawancara dengan Selamat Rianto salah satu narapidana tindak pidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada tanggal 25 November 2023.Pukul 09.30 Wib

pengusulan *online* yang terlalu banyak sehingga sering terjadinya *server error*.¹⁵

Bapak LS Hari Candra Simanjuntak mengatakan dalam upaya selanjutnya yaitu segala bentuk kerja sama baik dari dalam Rutan maupun dari pihak luar lapas, diharapkan setiap proses remisi dapat berjalan dengan lancar, karena di dalam peraturan telah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi. Sebagai institusi Negara sebaiknya pihak yang berperan penting dalam proses remisi dapat memberikan hak remisi tersebut kepada setiap narapidana dengan syarat tidak mengurangi efek jera terhadap narapidana yang bersangkutan. Dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi, disarankan untuk menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Untuk mendukung pemberian remisi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa data base dalam penghitungan remisi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Medi Ihwanto selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, ia menyatakan bahwa untuk pemberian remisi syarat yang diberlakukan oleh Rutan adalah para narapidana telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik atau tidak masuk dalam Registrasi, tahanan tidak sedang menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti, dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh jaksa. Pelaksanaan pemberian remisi dimulai ketika narapidana telah berada di rutan, narapidana akan diamati oleh tim bagian pengamat Rutan kelas IIB Bengkulu selama 6 bulan menjalani masa tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Dalam hal pengamatan tersebut bertujuan untuk melihat proses perkembangan narapidana selama berada di rutan guna untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pemberian remisi bagi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Riki Boy Sandi salah satu narapidana tindak pidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada tanggal 25 November 2023. Pukul 10.30 Wib

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak LS Hari Candra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada Tanggal 26 November 2023. Pukul 09.30 Wib

narapidana tersebut khususnya bagi narapidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya narapidana yang telah diamati selama 6 bulan oleh tim pengamat Rutan Kelas IIB Bengkulu yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Narapidana akan direkomendasikan kepada Kepala Rutan Kelas IIB Bengkulu untuk mendapatkan remisi, kemudian Kepala Rutan melakukan verifikasi terhadap usulan dari tim pengamat untuk disetujui dan diusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan tembusan ke Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham.¹⁷

Menurut Bapak LS Hari Candra Simanjuntak, menyampaikan bahwa perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Rutan Kelas IIB Bengkulu. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali. Pengusulan remisi khusus menggunakan formulir R.K.I untuk remisi khusus sebagian dan formulir R.K.II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Rutan Kelas IIB Bengkulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Rutan Kelas IIB Bengkulu.¹⁸

Dari uraian pelaksanaan pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Bengkulu

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Medi Ihwanto selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada Tanggal 24 November 2023.Pukul 10.30 Wib

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak LS Hari Candra Simanjuntak selaku Staff Pelayanan Tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu, Pada Tanggal 24 November 2023.Pukul 09.30 Wib

mulai dari dasar hukum sampai pada tata cara pemberian secara teknis menunjukkan bagaimana pemberian remisi bagi para tahanan merupakan salah satu langkah untuk memenuhi hak dasar bagi para tahanan mengenai remisi bagi para terpidana yang tindak pidananya masuk dalam kategori ekstra *ordinari crime* salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan pemberian remisi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana narkoba sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat maupun ketentuan serta aturan aturan yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi yang diberikan terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu sudah berjalan efektif, dikatakan efektif karena fakta lapangan yang peneliti lakukan telah sejalan dan searah dengan regulasi yang berlaku. Pandangan pemberian remisi terhadap kasus tindak pidana narkoba dianggap efektif bagi pihak Rutan dan narapidana yang berada di dalam Rutan dikarenakan bagi pihak Rutan tidak menampung banyak narapidana yang membuat lapas kelebihan kapasitas sehingga narapidana merasa tidak nyaman berada di dalam lapas. pandangan pemberian remisi bagi narapidana sangat menguntungkan tanpa adanya kerugian dikarenakan narapidana berhak mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik di dalam lapas dan juga dibina menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat ketika sudah keluar dari Rutan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor

7 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat., Remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika selain harus memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, atau sudah menjalani masa hukuman paling lama 1 tahun.

2. Dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu sudah efektif. Dikatakan efektif karena fakta lapangan yang peneliti lakukan telah sejalan dan searah dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah narapidana yang memperoleh remisi khususnya narapidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Poernomo, 2008. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang, W. 2012. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dadang Hawari. 1991. “*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*” Balai Penerbit KFUI.
- Daud Pinasthika MR, 2013 *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Yogyakarta*. Fakultas Hukum: UNNES.
- Fathoni, A. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kudzaifah, D. & Wardiono Kelik. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Priatno, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung).
- Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Tim Media, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre,).

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana / Remisi

Permenkumham 7/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).

A.Suhartini, *Skripsi. Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Rumah Tahanan Klas Ii B Watansoppeng Tahun 2011-2016)*, Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makassar. 2017.

Idrus, Norman Syahdar, dan Wien Sukarmini. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Yuridis* 3, No. 2 (2017).

Kornia, I. Gusti Made Adika, AA Ngurah Yusa Darmadi, dan Sagung Putri ME Purwani. "Pelaksanaan Pemberian Remisi Sebagai Salah Satu Hak Narapidana Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 12 TAHUN 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2017).

Laras Astuti, 2017, "Eksistensi Keberadaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Marini Mansyur, 2011, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana* (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar), Skripsi, Makassar: Unhas.
- Marseli, Hendri Padmi, “*Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu*” 2021.
- Mosgan Situmorang. “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*”. Jurnal Penelitian Hukum: De Jure 16, No. 4 (2016): 374.
- Norman Syahdar Idrus, 2016, “*Pelaksanaan Pemberian remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*”, Vol 3, No. 2, Jurnal Yuridis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan nasional Vetran Jakarta.
- Paramitha Hatta, “*Kondisi Psikososial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*”, Skripsi. UIN Alauddin Makassar.2013.
- Prabawa, I. Kadek Satrya Budhi, I. Ketut Mertha, dan I. Wayan Suardana. “*Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar)*.” Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 2 (2013): 2.
- Pradana, Muhammad Ardi. “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan.*” E-Journal: Spirit Pro Patria 4, No. 2 (2018).
- Siti Khalimatun, Skripsi. *Analisis Remisi Bagi Narapidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum.Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2018.